



## PEMBENTUKAN TEORI SOSIOLOGI POLITIK OLEH IBNU KHALDUN

Oleh

**Agustina Damanik**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan

Email: agustinadamanik@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*This paper will try to illustrate the concepts offered by Ibn Khaldun on State and government, with the main explanations regarding the concept of ashabiyyah (group solidarity) and its role on state formation, rise and collapse. According to the Ibnu Khaldun, ashabiyyah is the driving force of the country and the foundation for the establishment of a state or dynasty . Ashabiyyah have a major role in the expansion of the country after the establishment of the country's foundation. When ashabiyyah is strong , the states can be expanded otherwise if asabiyyah weak , then the area of the states appears relatively limited*

**Kata Kunci;** *Teori, Sosiologi, Politik, dan Khaldun*

### A. Pendahuluan

Pada abad pertengahan dalam sejarah Islam, adalah abad yang penuh dengan pemikiran dan pemikir dalam berbagai bidang. Seperti Ibnu Khaldun salah satu tokoh yang jenius dan masyhur di antara tokoh intelektual modern. Kita bisa melihat karya-karya dari Ibnu Khaldun seperti penguasaannya didalam berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan, misalnya sosiologi, sejarah, dan politik sehingga tidak heran ketika Ibnu Khaldun dikategorikan menjadi seorang ahli sejarah, sosiologi, dan politik. Sehingga tidak heran ada banyak orang yang simpati dan mengatakan bahwa Ibnu khaldun adalah orang penting dan terhormat di alam semesta ini.

Ketika mengemukakan konsep politik Ibnu Khaldun tidak terlepas dari kenyataan dsan pengalaman yang dihadapi, disatu sisi ia melihat ikatan-ikatan bermasyarakat bernegara dan berperadabandilain pihak Ibnu Khaldun adalah seorang penganut muslim dan tentu saja itu sangat mempengaruhi sikapnya dalam memandang masalah tentang Tuhan, manusia dan masyarakat. Tulisan ini berusaha pada umumnya sebagai sesuatu yang berkembang terlepas dari agama, akan tetapi mencoba menggambarkan tentang konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun tentang Negara dan pemerintah, dengan penjelasan utamanya mengenai Ashabiyyah dan perannya



dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya.

## B. Biografi dan Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid yang diberi gelar Waliyyuddin, Ibnu Khaldun. Lahir pada awal bulan Ramadhan 732 H di Tunisia. Dan meninggal pada tanggal 25 Ramadhan 808 H (1406 H) di Kairo Mesir. Ibn Khaldun adalah seorang tokoh muslim terkemuka. Sehingga pada zamanya Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang ilmuwan yang terkenal dan pionir.

Tidak hanya dalam bidang keagamaan Ibn Khaldun juga terkenal sebagai seorang ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, dan ia juga pernah terjun dalam perpolitikan prakti. Itu semua tidak terlepas dari latar belakangnya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Moor Spanyol. Pendidikan Ibn Khaldun dimulai dari ayahnya sendiri yang bertindak sebagai guru pertama. Kemudian belajar bahasa kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, serta Abu Abdillah al-Wadiyashi. Belajar fiqh kepada Abi Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qassim Muhammad al-Qashir. Selain itu, Ibn Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Arabi.<sup>1</sup>

*Pertama*, fase pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751 H.<sup>2</sup> Seperti kebiasaan pada waktu itu, sang ayah adalah guru pertamanya. Setelah itu, ia belajar di luar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar dengan Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahr. Ilmu fiqh ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika dan astronomi.<sup>3</sup>

*Fase kedua*, keterlibatan dalam dunia politik. Kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam<sup>4</sup> yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik tersebut. Latar belakang pendidikannya telah membedakan Khaldun dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dengan dalam dinamika intrik, ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku-perilaku politik kaum elit.<sup>5</sup> Karir politik Khaldun dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukan Abu Zaid, dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Khaldun melarikan diri dan bekerjasama dengan



sultan Abu Inan di Tlemeen sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fress Maroko. Selanjutnya Khaldun melibatkan diri ke dalam sebuah intrik politik dimana ia bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan, Amir Abu Abdullah Muhammad, untuk merebut kekuasaan sang sultan. Intrik ini melahirkan malapetaka bagi Khaldun. Ia dipenjara Sultan Abu Inan selama dua tahun begitu persengkokolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya Khaldun mengabdikan pada Abu Salim penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.<sup>6</sup>

Setelah Abu Salim wafat pada tahun 1362, Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada. Sang raja menjadikannya duta besar. Tugas yang pernah diembannya adalah sebagai utusan Sultan Muhammad V untuk memenuhi Pedro dari Castilla, Spanyol. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatanganan perjanjian perdamaian antara kedua negara.

Karena situasi tidak bersahabat dan kebetulan mendapat undangan dari Abu Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, disanalah ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya.<sup>7</sup> Karena tidak sepeham dengan sebagian pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi sebagai perdana menteri. Di tengah jalan, intrik dan pergolakan politik yang tidak kenal henti yang melanda kerajaan-kerajaan Islam menjadikannya beralih loyalitasnya kepada Abu Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.

*Fase ketiga*, Khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Ini dilakukan setelah fase pengabdianya kepada kekuasaan dalam berbagai pemerintahan. Nampaknya Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya di benteng Bani Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, *Al-Ibar* beserta *Muqaddimah-nya*.<sup>8</sup> *Fase keempat* adalah babak akhir kehidupannya. Ibnu Khaldun mulai mengundurkan diri dari dunia politik. Khaldun dengan serius membenamkan diri pada tugas



intelektualnya, menyelesaikan karya monumental yang dianggap masih tersisa. Seluruh karya yang dihasilkan diberikan kepada penguasa. Intrik politik tidak selesai melandanya. Ia menjadi sasaran tembak para elit dalam lingkaran kekuasaan.<sup>9</sup> Pembesar negeri tersebut telah merusak persahabantannya dengan sultan Abu Al-Abbas. Kenyataan inilah yang mendorongnya meninggalkan wilayah kekuasaannya. Khaldun membuat kamufase dengan meminta izin kepada sultan untuk pergi haji. Dalam kenyataannya, Ibnu Khaldun tidak mengarahkan kakinya ke Mekkah. Ia ke Iskandaria.<sup>10</sup> Dalam periode ini, Khaldun bertemu Timur Lenk- sang penakluk dan penguasa baru yang sangat terkenal dalam sejarah kekuasaan dan peradaban Islam di Timur Tengah- di Syiria. Seperti sultan lainnya, Timur Lenk mengagumi pemikiran Khaldun hingga ia menawari Khaldun untuk bekerja di istananya. Tampaknya fase kontemplasi Khaldun tidak menyisakan nafsu politik dan kekuasaan lagi. Akhirnya Khaldun menolak tawaran yang menggiurkan itu.

Khaldun pada akhirnya tidak lagi menghiraukan godaan-godaan kekuasaan di akhir fase kehidupannya. Bahkan ia tak lagi bergeming untuk memberikan reaksi terhadap pancingan lawan-lawan politiknya. Khaldun tetap menjadi ilmuwan dan hakim agung sampai akhir hayat.

### C. Karya –Karya Ibnu Khaldun

Meskipun Ibnu Khaldun hidup di masa peradaban Islam mulai mengalami kehancuran atau menurut Nurkholis Majid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif, yang melahirkan pemikiran- pemikiran besar yang dituangkan dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinil dan kepeloporan.<sup>11</sup> Berikut ini beberapa karya Ibnu Khaldun yang cukup terkenal, antara lain :

1. Kitab *al-I'bar wa Dhu'uan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al- A'rab wa al- 'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharhiim min Dzawi al- Suthan al-Akbar.*

Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya sajak yang tinggi ini dapat diterjemahkan menjadi; Kitab contoh-contoh dan rekaman-rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari arab, Persia, Barbar dan orang-orang yang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena judulnya terlalu panjang, orang sering menyebutnya dengan kitab *al- 'Ibar* saja, atau kadang cukup dengan sebutan *Tarikh Ibnu Khaldun.*<sup>12</sup>



2. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun

Dalam volume tujuh jilid, kajian yang dikandung begitu luas menyangkut masalah-masalah sosial, para Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.<sup>13</sup>

3. Kitab al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan

Adalah kitab otobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap di mana ia dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya.<sup>14</sup>

Selain karya yang telah disebutkan di atas, Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lainnya seperti: *Burdah al-Bushairi*, tentang logika dan aritmatika dan beberapa resume ilmu fiqh. Sementara itu masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan yaitu sebuah ikhtisaryangditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya sendiri ini berjudul *Lubab al-Muhashal fi Ushul ad-Din*. Dan kitab *Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Massat* yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama yang berbicara tentang teologiskolastik dan karya kedua membahas tentang mistisisme konvensional.<sup>15</sup>

#### D. Pemikiran Politik dan Sosiologi Politik Ibnu Khaldun

Filsafat politik dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu di dalam pengkajian mengenai negara. Ada beberapa lembaga kenegaraan dan karakter kekuasaan di dinasti-dinasti dan negara-negara Islam. Pengkajian ini diuraikan mulai dari pasal keduapuluh lima sampai dua puluh delapan al- Muqaddimah. Dalam pasal ini dibahas mengenai khilafah atau immamah dan syarat-syaratnya, peralihan dari khalifah menjadi kerajaan, bai'at, kedudukan sebagai putra mahkota, gelar amirul mukminin, peringkat raja dan sultan, bagian-bagian pekerjaan dan perpajakan dan Sekretariat Negara.<sup>16</sup>

1. Peran Politis *Ashabiyah*

Menurut Khaldun, suatu suku mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial-politik tertentu, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan Ashabah. Karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu penguasaan atas kekuasaan dan pendirian negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya *ashabiyah* yang mengakibatkan melemahnya negara.<sup>17</sup>

*Ashabiyah* adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Bilamana negara atau dinasti tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan *ashabiyah*. *Ashabiyah* mempunyai peran besar dalam perluasan negara



setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila *ashabiyah* itu kuat, maka negara yang muncul relative terbatas.<sup>18</sup>

Ashabiyah bisa merupakan alat perjuangan, alat penyerang dan bertahan. Dapat pula sebagai alat penyelesaian konflik antar golongan, yakni bila konflik ini harus diselesaikan secara kekerasan. Dalam masyarakat menetap tujuan terakhir ashabiyah adalah Mulk, kekuasaan-wibawa yang pada akhirnya melemahkan kemauan agar dituruti, kalau perlu dengan kekerasan. Pada tahap selanjutnya, alat-alat kekuasaan termasuk ashabiyah kurang memegang peranan sebagaimana ia diperlukan untuk menegakkan kekuasaan itu di awal mula. Penguasa dan orang-orang yang telah membantunya menegakkan kekuasaan itu mulai melihat kepada hal-hal lain yang dirasakan lebih menarik, terutama kemewahan yang datang tanpa dicari. Karena pada dasarnya tabiat kekuasaan itu diiringi dengan kemewahan. Tetapi kemewahan ini hanya pada permulaan saja akan menambah si penguasa. Akhirnya ia akan melemahkan kekuatan ini, sebab ia mengandung sifat yang merusak akhlak manusia. Kemewahan akan melupakan seseorang tentang kewajiban-kewajibannya yang sesuai yang harus dipenuhi sebagai seorang penguasa. Kemudian melemahkan ashabiyah. Dengan demikian, seorang penguasa mendasarkan kekuasaannya pada serdadu upahan, yang merupakan pejabat-pejabat yang tidak mengenal ashabiyah. Bila ini terjadi, sekurang-kurangnya buat sementara, kekuasaan akan menuju pada pemusatan kekuasaan. Kemudian kekerasan untuk memaksakan kehendak.

Di masa awal terbentuknya sebuah negara, bagaimanapun ashabiyah tetap dianggap sebagai faktor esensial bagi kelanjutan negara. Pada masa ini, masyarakat harus membangun lembaga-lembaga yang perlu bagi budaya peradaban, termasuk kelembagaan kelas penguasa baru. Hasilnya, kata Khaldun, adalah kemunculan hubungan-hubungan politik baru, selain berbagai aktivitas politik yang baru. Semua ini tak akan tercapai dengan baik, kecuali dengan ashabiyah, yang akan semakin kuat dengan bantuan sentimen agama.

Karena itu, ia memandang pentingnya ashabiyah dalam suatu masyarakat dan negara. Bila Ashabiyah dibina dan dikelola dengan baik, ia akan menjaga dan terus menumbuhkan stabilitas politik dan keamanan. Teori yang dikemukakan Khaldun itu kemudian dikenal orang sebagai “Teori Disintegrasi” (ancaman perpecahan suatu masyarakat/bangsa).

## 2. Masyarakat dan Negara

Ikatan bermasyarakat, bernegara dan berperadaban pada umumnya sebagai suatu yang tumbuh dan tenggelam lepas dari soal apakah agama dalam pengertian *nubuwwah* datang atau tidak, karena ia mengakui bahwa banyak peradaban dan negara tumbuh dan tenggelam tanpa



didatangi oleh ajaran-ajaran nabi. Bagi Khaldun, adanya masyarakat, negara dan peradaban tidak bergantung pada adanya agama. Meski di lain pihak Khaldun adalah seorang yang ditandai oleh ajaran-ajaran agama Islam, terutama fikih dan tafsir. Ini mempengaruhi sikapnya terhadap Tuhan, manusia dan masyarakat.<sup>19</sup>

Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan negara menurut pemikiran Yunani kuno bahwa negara dan masyarakat adalah identik. Adapun Khaldun, ia berpendapat bahwa berhubungan dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat, artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk dapat hidup; baik untuk memperoleh makanan maupun mempertahankan diri. Sungguhpun ada perbedaan antara negara dan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut daulah, merupakan bentuk masyarakat. Sebagaimana bentuk suatu benda yang tidak dapat dipisahkan dari isi, maka demikian pulalah keadaannya dengan negara dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menetap, yang telah membentuk peradaban, bukan yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomaden di padang pasir.<sup>20</sup>

Menurut Khaldun, kehidupan padang pasir itu belumlah disebut negara. Negara mengandung peradaban dan ini hanya mungkin tercapai dengan kehidupan menetap. Negara pun harus mengandung kekuasaan, kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa dan kekuasaan inilah dasar pembedaan negara dan masyarakat.

### 3. Negara dan Perkembangannya Sepanjang Sejarah

Negara menurut Khaldun adalah suatu makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut adalah:<sup>21</sup>

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir;
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan;
- c. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

Negara dalam perkembangannya melalui lima tahap :



1. tahap pendirian negara

Tahap untuk mencapai tujuan, menaklukan segala halangan dan rintangan, menguasai kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan *ashabiyah*. Khaldun berpendapat bahwa *ashabiyah* yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh.

2. tahap pemusatan kekuasaan

Pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan *ashabiyah*, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota *ashabiyah* dari roda pemerintahan.

3. tahap kekosongan dan kesantiaian

Tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabdikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya.

4. tahap ketundukan dan kemalsan

Pada tahap ini, negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi, negara seakan-akan sedang menantikan permulaanakhir kisahny.

5. tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan

Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan.

Perlu dicatat bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad keempat belas. Dengan melihat keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam pada umumnya ketika itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab-Islam di Andalusia di bawah tekanan pasukan Spanyol, tidaklah mengherankan bilamana ia berpendapat bahwa segala sesuatu akan hancur.<sup>22</sup>

#### 4. Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun

Salah satu sumbangan yang orisinal dari Ibnu Khaldun adalah teorinya mengenai Ashabiyah dan perannya dalam pembentukan negara, kejayaan, dan keruntuhannya. Konsep ashabiyah ini merupakan poros utama dalam teori-teori social Ibnu Khaldun.

Thaha Husein mengatakan bahwa kata *Ashabiyah* berasal dari kata '*ashaba* yang berarti kelompok. Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti menikat. Secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan social budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat





dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Ibnu Khaldun sendiri menganggap *ashabiyah* sebagai suatu kekuatan dan pengaruh didasarkan atas kesamaan. Kesamaan itu tidak hanya kesamaan yang didasarkan atas ikatan darah, tetapi juga didasarkan atas pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.

Khaldun tidak hanya menjelaskan konsep *ashabiyah* sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun disamping itu juga menghadapkannya dengan konsep-konsep yang telah ada dan berkembang pada waktu itu. *Ashabiyah* lahir dari hubungan-hubungan darah (*blood ties*) dan ikatan yang menumbuhkannya. Ikatan darah memunculkan perasaan cinta terhadap saudara dan kewajiban untuk menolong dan melindungi mereka dari tindak kekerasan. Semakin dekat hubungan darah dan seringnya kontak diantara mereka, maka ikatan-ikatan dan solidaritas akan semakin kuat. Tetapi sebaliknya, semakin renggang hubungan tersebut maka ikatan-ikatan tersebut akan semakin melemah.

Adapun tugas *ashabiyah* dalam kehidupan kemasyarakatan menurut Ibnu Khaldun sangat dominan. *Ashabiyah* lah yang telah menjadi motor dari kekuatan dan karena itu dapat dikatakan yang menjadi penggerak utama dari sejarah manusia adalah *ashabiyah*. Ibnu Khaldun berpandangan tujuan *ashabiyah* adalah untuk mewujudkan *al-mulk*, karena *ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, menumbuhkan pertahanan bersama, sanggup mendasarkan tuntunan-tuntunan dan kegiatan lain. Dengan kata lain bahwa tujuan dari *ashabiyah* adalah superioritas (*at-taghalulul-mulk*).

Dalam kehidupan bernegara (*nation*), Ibnu Khaldun melihat terdapat dua kekuatan dominan yang membentuk nasib-nasib mereka. Kekuatan *pertama* adalah kekuatan primitif dan utama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabiyah*, atau elemen-elemen pengikat masyarakat, solidaritas sosial atau perasaan kelompok yang mampu menyatukan masyarakat, sebuah negara maupun sebuah kerajaan dan dalam kelompok yang lebih luas, dapat disamakan dengan patriotisme. Akan tetapi patriotisme dan *ashabiyah* bukanlah merupakan sinonim meskipun dalam bentuk yang paling ekstrimnya, patriotisme adalah bentuk lain dari *ashabiyah* sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun.<sup>23</sup>

*Ashabiyah* akan muncul dan berkembang ketika perasaan untuk melindungi diri membangkitkan *sense of Kindship* (rasa kekeluargaan) yang kuat dan mendorong manusia untuk menciptakan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini adalah kekuatan vital bagi suatu negara dimana dengannya mereka akan tumbuh dan berkembang dan jika



melemah, maka mereka akan mengalami kemunduran. Kekuatan *kedua* adalah agama, Ibnu Khaldun mengembangkan suatu solidaritas yang tanpanya negara tidak akan bisa eksis. Agama merupakan pendukung *ashabiyah* dan pada dasarnya juga memperkuat *ashabiyah*, dengan kekuatan religius ini bangsa Arab dapat membangun suatu peradaban yang besar.<sup>29</sup> Sungguh demikian, menurut Ibnu Khaldun, apabila *ashabiyah* dan agama terhadap proses timbal balik, maka peranan *ashabiyah* dalam mendapatkan politik akan sangat besar dan memiliki kekuatan besar untuk menciptakan integritas kekuatan politik. Sebaliknya apabila *ashabiyah* dan agama tidak beriringan maka kekuatan besarnya akan sirna begitu saja.

#### 5. Idealisme vs Realisme

Di kalangan umat Islam terdapat paham akan datangnya Ratu Adil (Imam Mahdi) yang terkenal dengan sebutan 'mahdiyyisme'. Paham ini terutama berkembang di kalangan Syiah. Merekalah kelompok pertama dalam Islam yang merasakan ketidakadilan di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Selain kaum Syiah, paham tersebut juga berkembang pada kaum sufi waktu itu. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan pandangan dalam hal ini. Syiah berpendapat bahwa Mahdi adalah seorang tokoh historis yang hidup pada masa lampau kemudian menghilang, dan sedang menunggu perintah dari Allah SWT untuk muncul kembali sebagai juruselamat.<sup>24</sup>

Sedangkan kaum Sufi berpendapat bahwa Mahdi itu manusia biasa yang akan dilahirkan pada suatu masa yang akan datang, dan setelah dewasa ia akan muncul mengemban misinya membebaskan masyarakat. Paham akan datangnya Imam Mahdi tampaknya timbul akibat kesenjangan yang lebar antara prinsip ideal dan kenyataan aktual dari kehidupan masyarakat yang berkembang. Untuk merekonsiliasi antara ideal yang lama dengan real yang ada kini, masyarakat biasanya terpaksa mengacu kepada doktrin masa depan berupa harapan adanya kedatangan Ratu Adil.

Ibnu Khaldun secara terang-terangan menolak kedatangan Imam Mahdi. Ia meyakini bahwa masyarakat itu diatur oleh proses dialektis. Ibnu Khaldun berbeda dengan dialektika sufi yang terlalu banyak unsur idealisme. Pendorong utama di balik konsep dialektika Ibnu Khaldun adalah *ashabiyah*. Ia berpendapat bahwa Mahdi yang baik adalah Mahdi yang dapat mengarahkan *ashabiyah* yang tumbuh ke tujuan yang alami.<sup>25</sup>

Ibnu Khaldun lebih menyukai mereka yang bergerak mengikuti, dari pada mereka yang menentang dialektika sosial (bergerak melingkar dari baik ke buruk, kemudian menjadi baik kembali) sebagaimana konsep kaum sufi. Kalau boleh dibandingkan, kritik Ibnu Khaldun



terhadap kaum sufi mirip dengan kritik Marx terhadap Hegel yang menolak konsep *idealisme* Hegel dan menggantinya dengan *realism*.

#### 6. Kekuasaan vs Kebenaran

Khaldun tidak menyederhanakan persoalan hanya dengan menyatakan bahwa kekuatan *ashabiyah* yang akan menghasilkan kebenaran. Ia melihat *ashabiyah* dalam konteks *nomadek*. Lebih lanjut, ia mengatakan syekh nomadis yang mempunyai *ashabiyah* yang kuat biasanya juga seorang pemimpin yang baik. Pribadi kekuatan dan kebenaran biasanya berjalan seiring. *Ashabiyah* yang kuat juga menunjukkan watak yang baik dan kualitas kepemimpinan yang tinggi.

Kemudian Khaldun mengklasifikasikan raja ke dalam pimpinan dan penguasa. Ternyata *ashabiyah* tidak memperoleh tempat bila kekuasaan memegang peranan. Apabila kekuasaan mulai mengganti kepemimpinan, *ashabiyah* setahap demi setahap kehilangan kekuasaan dan akhirnya mati.

#### 7. Islam vs Nomadisme

Khaldun mengklasifikasikan dari sudut pandang kontrol sosial, menjadi dua tipe: *badawah* dan *hadharah* (primitif dan peradaban). Di kalangan masyarakat primitif hubungan darah lebih diutamakan, kontrol sosialnya masih cukup tinggi.<sup>35</sup> Sebaliknya dalam masyarakat berperadaban, kontrol sosial lebih rendah. Teori tersebut dalam sosiologi modern dikembangkan oleh Emile Durkheim dengan istilah solidaritas mekanis (sama dengan *badawa*) dan solidaritas organis (sama dengan *hadharah*).

Dalam hubungan *ashabiyah* dan agama, menurut Khaldun terdapat dampak timbal balik diantara keduanya. Lebih lanjut, Khaldun berupaya untuk mengkompromikan antara prinsip *ashabiyah* dan prinsip Islam. Menurutnya, *ashabiyah* yang dilarang adalah *ashabiyah* yang berkembang pada zaman jahiliyah yang timbul dari kesombongan dan keinginan untuk bergabung pada suku-suku yang terkuat dan terhormat. Sedangkan *ashabiyah* yang didasarkan atas faktor-faktor keagamaan dan faktor duniawi yang legal, maka diperbolehkan.

'*Ashabiyah* dan konsepsi Khaldun tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan. Bahkan *ashabiyah* identik dengan power. Demikian, kelihatan dalam sejarah betapa berbagai kerajaan besar dihancurkan oleh golongan masyarakat *Badawah*. Di Eropa, zaman masyarakat ini diwakili oleh orang Barber yang menaklukkan berbagai kekaisaran. Suatu masyarakat *Badawah* yang dipimpin oleh seseorang yang dapat diterima akan dapat melumpuhkan golongan masyarakat *Hadharah* yang sekarat. Mereka mengambil alih seluruh



kekuasaan dan budaya yang dimiliki golongan Hadharah. Lambat laun golongan Badawah yang menghancurkan golongan Hadharah, kehilangan kebaduwiannya, 'ashabiyahnya, dan menjadi Hadharah yang akan digeser oleh golongan Badawah berikutnya. Hal ini akan selalu terjadi pergantian. Konflik eksternal dalam masyarakat, akan menimbulkan sirkulasi dan perubahan struktur kekuasaan. Inilah yang disebut Khaldun sebagai proses daur sejarah yang berlangsung dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Teori proses daur sejarah Ibnu Khaldun ini lebih unggul dibandingkan dengan teori *linear* masyarakat modern sebagaimana yang dikemukakan oleh para penganut Marx, Weber atau kalangan modernisme lain. Sebab ketika ditanyakan kepada mereka: Apa sesudah komunisme? Apa sesudah kapitalisme? Dan apa sesudah modernisme? Terdapat kesulitan bagi mereka untuk menjelaskannya. Hingga di sini komunisme, kapitalisme, dan modernisme, terdapat kebuntuan untuk memproyektir masyarakat apa yang adasesudahnya.

Demikian, Ibnu Khaldun tampil sendirian sebagai genius sejarah terbesar dari Islam yang pertama melahirkan suatu konsepsi filosofis dan sosiologis tentang sejarah. Jika ahli sejarah lain disebut sebagai "pembuat sejarah" tetapi tak pernah menulis sejarah, maka Ibnu Khaldun adalah pembuat sejarah sekaligus penulis sejarah.

## E. Penutup

Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah karakteristik sosial-politik tertentu yang terdapat didalam suatu suku, dan berada pada kerangka kebudayaan desa. Ashabiyah adalah merupakan kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Ashabiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila ashabiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas, sebaliknya bila ashabiyah lemah, maka luas negara yang muncul relatif terbatas.

Ashabiyah bisa merupakan alat perjuangan, alat penyerang dan bertahan. Dapat pula sebagai alat penyelesaian konflik antar golongan, yakni bila konflik ini: harus diselesaikan secara kekerasan. Dalam masyarakat menetap tujuan terakhir ashabiyah adalah Mulk, kekuasaan-wibawa yang pada akhirnya melemahkan kemauan agar dituruti, kalau perlu dengan kekerasan. Bilamana negara atau dinasti atau mulk tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan ashabiyah.

Negara yang terbentuk didasari pada ashabiyah, biasanya berumur tiga generasi,



yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut ialah : Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan Negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

---

**End Note :**

<sup>1</sup>Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 421.

<sup>2</sup>Ali Abdul Al-Wafi, *Abdul Rahman Ibn Khaldun: Hayatuhuwa Atsaruhuwa Modighiru Abqoriyithi* (Al-Qahira: Maktabah Misra, TT), hlm. 9.

<sup>3</sup>Zainab, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 10.

<sup>4</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

<sup>5</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 12.

<sup>6</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibid*, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 13

<sup>8</sup>Madjid Fachry, *A.History of Islamic Philosophy* (New York: Colombia University Press, 1988), hlm. 324.

<sup>9</sup> Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>11</sup>Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradapan*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997), hlm. 152.

<sup>12</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 12.

<sup>13</sup>Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 65.

<sup>14</sup>Zainab al -Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 29.

<sup>15</sup>, *Ibid*, hlm. 68.

<sup>16</sup>Zainab Al-Khudhairi, hlm. 164.

<sup>17</sup>Zainab Al-Khudhairi, hlm. 141

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 159.

<sup>19</sup>Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 70.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 71

<sup>21</sup>Zainab, hlm. 168.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 184.

<sup>23</sup>Eugene. A. Myers, *Zaman Keemasan Islam: Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. M. Maufur al-Khoiri, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Utama, 2003), hlm. 72.

<sup>24</sup>Fuad Ba'ali dan Mawardi, hlm. 77.

<sup>25</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Dar Al -Kasyaf, TT), hlm. 159.



---

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Al-Khudairi, Zainab, *Filasafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Al-Tanji, Muhammad Ibnu Thawit, *Al-Ta'arif bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syaman*, Mesir: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1951.
- Al-Wafi, Ali Abdul, *Abdul Rahman Ibnu Kkhaldun: Hayatuhu wa Atsaruhu wa Modighiru Abqoriyithi*, Al-Qahira: Maktabah Misra, TT.
- Ba'ali, Fuad dan Ali Mawardi, *Ibnu Khaldun dan PolaPemikiran Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Esposito, Jhon L., (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Fachry, Madjid, *A History of Islamic Philosophy*, New York: Colombia University Press, 1988.
- Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata SosialFakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- , "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Cairo: Dar Al-Kasyaf, TT.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradapan*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997.
- Myers, Eugene. A., *Zaman Keemasan Islam: Parailmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. M. Maufur al-Khoiri, Yogyakarta: Fajar Pustaka Utama, 2003.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik, Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Suharto, Toto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Zainab, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Zainuddin, Rahman, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.